

## GANYANG MALAYSIA Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966

Chairudin Nur<sup>1)</sup> dan Ravico<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> STKIP PGRI Lubuklinggau dan IAIN Kerinci

<sup>1)</sup>[chairudinnur40@gmail.com](mailto:chairudinnur40@gmail.com) <sup>2)</sup>[ravicoiainkerinci@gmail.com](mailto:ravicoiainkerinci@gmail.com)

---

---

### Abstrak

Hubungan Indonesia-Malaysia sering kali menuai konflik dari hal budaya, batas wilayah bahkan politik. Konflik ini diawali oleh sejarah pembentukan federasi malayu yang mengikut sertakan wilayah Sabah dan Serawak. Pertikaian ini pada akhirnya menimbulkan gencatan senjata diantara kedua Negara serumpun. Penelitian merupakan penelitian historis dengan menggunakan langkah-langkahnya yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Untuk menjawab pertikaian ini digunakan teori konflik. Adapun hasil penelitian yaitu pertikaian kedua negara yang terus memas hingga 1966. Upaya politik luar negeri dilakukan dengan perundingan dari tahun 1963-1966 dengan menghasilkan perjanjian Bangkok dan wilayah Sabah-Serawak menjadi wilayah Malaysia.

**Kata kunci:** Indonesia, Malaysia, perundingan dan konflik

### Abstract

*Indonesia-Malaysia relations often lead to conflicts from cultural, regional and even political boundaries. This conflict began with the history of the formation of the Malay Federation which included the Sabah and Sarawak regions. This dispute eventually led to a ceasefire between the two allied countries. The research is a historical study using the steps of heuristics, verification, interpretation and historiography. To answer this dispute, conflict theory is used. The results of the study are the two countries' conflicts which continued until 1966. Foreign policy efforts were carried out through negotiations from 1963-1966 to produce the Bangkok agreement and the Sabah-Serawak region into Malaysian territory.*

**Keywords:** Indonesia, Malaysia, negotiations and conflicts

---

---

### Pendahuluan

Hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan bagian yang alamiah. Karena kedekatan geografis ini ialah faktor penting yang tidak boleh dilupakan, bahwa Indonesia dengan Malaysia telah terlahir sebagai negara yang hidup berdampingan. Oleh karena itu pula, kedekatan geografis ini telah terjadi kontak-kontak politik pertukaran perdagangan dan bahkan perkawinan di antara kedua negara ini. (Efantino & Arifin, 2009:89). Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga yang mempunyai pertalian yang erat. Hubungan Indonesia dan Malaysia sering

dikaitkan dengan retorika kedekatan, persamaan budaya dan bangsa serumpun (Sunarti, 2014:1).

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan kedekatan yang erat sebagai negara satu rumpun karena memiliki persamaan etnis dan budaya diantara keduanya. Faktor kedekatan wilayah dan banyaknya persamaan kedua negara, hal ini juga didukung dengan interaksi antara kedua negara terjalin sangat baik sehingga menyebabkan kerjasama diberbagai bidang kehidupan baik itu ekonomi, sosial maupaun pemerintahan, serta terjadinya proses perkawinan dari kedua negara.

Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian persahabatan. Perjanjian ini memberikan makna yang besar dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara. sehubungan dengan hal itu, Indonesia telah dinggap sebagai kakak dari Malaysia dikarenakan Indonesia lebih awal memperoleh kemerdekaan (Sunarti, 2014:71).

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk lawatan muhibah dan perjanjian persahabatan turut dikaji. Membicarakan soal ekonomi, perdagangan, kerjasama menstabilkan harga bahan mentah, kerjasama melabur bijih timah dan masalah penyeludupan. Hingga membicarakan hubungan sosial, agama, kebudayaan, kebajikan, pelajaran dan bahasa.

Dalam hal ini, kedua negara terjalin kepercayaan yang baik antar keduanya. Akan tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh Malaysia untuk membentuk federasi Malaysia yang bertujuan untuk menggabungkan wilayah Sabah dan Sarawak agar menjadi wilayah bagian Malaysia. Alasan yang diungkapkan kepada Indonesia bahwasanya tujuan pembentukan federasi Malaysia ialah untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara dalam bidang politik dan ekonomi (Darmawan, 2005:461).

Tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rachman di Singapura akan membentuk federasi Malaysia meliputi Malaya, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah. Tengku Abdul Rachman yang akan membentuk federasi Malaysia dibicarakan dengan pihak Indonesia oleh utusan Malaya yang datang ke Jakarta. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Subandrio menyatakan tidak keberatan.

Indonesia pada saat itu masih sibuk dengan urusan Irian Barat dan tidak ingin membuat persoalan dengan negara tetangganya.

Setelah menempuh perundingan dalam pembentukan federasi Malaysia maka telah tercapai kesepakatan untuk meresmikan federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah. Dalam pembicaraan antara Tengku Abdul Rachman, Lew Kuan Yew, dan Horald Mac Milan tercapailah kesepakatan yaitu: membentuk federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah (Efantino & Arifin, 2009:33).

Pada bulan Juni 1962 telah tercapai kesepakatan dengan pemerintah Inggris untuk meresmikan bedirinya federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963. Pihak Inggris melihat adanya kesempatan dan peluang untuk pembentukan federasi Malaysia dan pihak pemerintah Indonesia belum sadar akan tujuan yang sebenarnya yang telah direncanakannya sebelumnya, maka secepatnya mencetuskan pembentukan federasi Malaysia tersebut. Hal ini tentunya mempunyai tujuan tersendiri seperti halnya untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mempertahankan wilayah jajahan yang dikuasi oleh Inggris sesuai dengan tujuan utamanya, yang diperuntukkan untuk kepentingan Malaysia.

Sebelum peresmian federasi Malaysia, pihak pemerintah Indonesia tersadar bahwa federasi Malaysia mempunyai tujuan untuk menguasai wilayah Indonesia di Kalimantan Utara yaitu Sabah dan Sarawak. Dengan demikian maka Indonesia menentang pembentukan federasi Malaysia, hal ini dilakukan

setelah menyelesaikan masalah Irian Barat, dan penentangan tersebut merupakan awal konflik terjadinya konfrontasi Malaysia terhadap Indonesia.

Bulan Januari 1963 Soekarno menyatakan menolak pembentukan federasi Malaysia. Soekarno menuduh federasi Malaysia sebagai negara boneka Inggris, sebagai Neo-Kolonialisme yang membahayakan Indonesia (Darmawan, 2005:462). Ricklefs (2009:413) juga mengatakan bahwa, Pada bulan Januari 1963 Soekarno menyatakan bahwa usulan Malaysia itu tidak dapat diterima oleh Indonesia, dan Subandrio menegaskan sikap Indonesia sebagai sikap Konfrontasi.

Terkait tentang penentangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap konfrontasi yang dilakukan Malaysia, sikap penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia semakin keras ketika Menteri Luar Negeri Subandrio secara resmi menyatakan kebijakan konfrontasi terhadap pembentukan federasi Malaysia pada tanggal 20 Januari 1963 (Sunarti (2014:95).

Berawal dari permasalahan ini Indonesia mengambil langkah tindakan konfrontasi terhadap Malaysia untuk mempertahankan hak atas Sabah dan Sarawak. Akibatnya kedua Negara mengalami ketegangan untuk beberapa waktu. Kemudian untuk mengurangi ketegangan yang telah terjadi dari negara yang bersangkutan, diadakanlah pertemuan untuk upaya meredakan ketegangan tersebut.

Konflik yang ditimbulkan oleh Malayasia dalam upaya pembentukan federasi Malaya tersebut cukup melukai hati bangsa Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan Irian Barat pada masa itu.

Kemudian Indonesia mengambil langkah politik luar negeri untuk mengatasi konflik tersebut. Diantaranya politik luar negeri Indonesia yaitu Mei tahun 1963 di Tokyo diadakan pertemuan antara Presiden Suekarno dan Perdana Menteri Tungku Abdul Rahman dari persekutuan Melayu. Pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselesihan, perbedaan pendapat, serta akan membatasi diri untuk tidak saling melakukan serangan kata (Usman, 2019:36).

Untuk merumuskan lebih lanjut hasil pertemuan Tokyo, diadakan pertemuan Mentri Luar Negeri tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina, di Manila pada bulan Juni 1963. Dalam perrtemuan Manila, Indonesia dan Filipina menyatakan tidak keberatan dibentuknya federasi Malaysia, asal hal itu dilakukan atas dasar hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat di wilayah-wilayah yang hendak digabungkan, dan ditentukan oleh *otoritas* yang bebas dan tidak berpihak, Sekretaris Jendral PBB (Efantino,2009:42).

Dari uraian latar belakang di atas penelitian ini, bermaksud untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai “politik luar negeri Indonesia dalam Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966” Hal ini dianggap penting karena berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966?

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi permasalahannya antara lain sebagai berikut: Pada aspek spasial, Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian konflik tersebut terfokus pada politik luar negeri, yang dilaksanakan pada forum Internasional. Dalam aspek temporal, diambil pada tahun 1963 sampai 1966. Dibatasi dari tahun 1963, dikarenakan adanya upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia, ke dalam sebuah perundingan damai.

### Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian sejarah (*historis*). Menurut Abdurahman (2007:63), penelitian sejarah adalah “Penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau”. Sementara menurut Gottschalk (1985:39), penelitian sejarah merupakan “Proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau”. Adapun Tahapan penelitian yang digunakan ialah Heuristik (menemukan sumber) yaitu kemampuan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Kritik Sumber, ialah kritik seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperolehnya. Apabila seorang peneliti sejarah telah yakin bahwa sumber sejarah yang telah diperoleh benar-benar asli. Interpretasi (Kredibilitas sumber) ialah ditetapkan dari fakta-fakta yang teruji, yaitu fakta-fakta yang bermakna karena saling berhubungan atau saling menunjang (Rochmat, 2009:150). Langkah akhir ialah historiografi ialah langkah

penulisan sejarah sehingga tersusun dengan baik.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Latar Belakang Konflik

Terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia disebabkan karena adanya pembentukan federasi Malaysia yang akan menggabungkan wilayah kawasan Melayu yang terdiri dari wilayah Malaysia, Sarawak, Singapura, Brunai dan Sabah. Dibentuknya kawasan Melayu ini sebenarnya mempunyai tujuan politik yang didalangi oleh Inggris yang mempengaruhi Malaysia agar bisa menguasai wilayah tersebut. Hal ini dilakukan karena wilayah tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus dari segi bidang perdagangan, industri dan mempunyai sumber daya alam yang cukup bagus.

Pembentukan federasi Malaysia membuat konflik antara negara Indonesia dan Malaysia. Dilihat dari konflik antara Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan teori konflik, yaitu pertarungan menang, kalah ataupun damai. Sehingga tindakan konfrontasi dilakukan oleh Indonesia agar wilayah Sabah dan Sarawak tidak jatuh ketangan Malaysia. Diluncurkannya konfrontasi oleh Indonesia terhadap Malaysia, Konfrontasi dilancarkan pemerintah Presiden Sukarno tahun 1963.

Presiden Sukarno menganggap Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris/ Barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru (*neocolonialism*) atau dalam bahasa Sukarno disebut Nekolim. Selain itu, kemarahan Sukarno diduga dipicu oleh sikap Tunku Abdul Rahman sendiri yang tidak memberi tahu tentang rencana penggabungan Sabah dan Sarawak dengan

Semenanjung Tanah Melayu menjadi Federasi Malaysia (Maksum, 2017:15).

## 2. Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam konflik perebutan wilayah Sabah dan Sarawak, Negara Indonesia dan Malaysia mengalami ketegangan dan berbagai tindakan dilakukan kedua negara. Sehingga strategi politik luar negeri Indonesia yaitu jalan keluar berupa diplomasi perundingan damai untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Diplomasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik kedua negara berbagai sidang telah dilakukan dan melibatkan berbagai unsur Internasional, diantaranya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berikut tindakan politik luar negeri Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia.

### a. Perundingan I di Tokyo Tahun 1963

Perundingan yang dilakukan oleh Indonesia pertama kali dilakukan di Tokyo pada tahun 1963. Jepang dalam hal ini bersedia untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia. Jepang menemui pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk bermusyawarah, agar kedua negara dapat bertemu di meja perundingan. Upaya yang dilakukan Jepang akhirnya dapat membawa kedua negara untuk berunding dalam menyelesaikan konflik, yang akan dilaksanakan di Tokyo (Kusmayadi, 2017:24),.

Pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963 di Tokyo diadakan pertemuan antara Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Tun Abdul Rahman dari persekutuan Melayu. Pertemuan itu menghasilkan

kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, dan negara yang bertetangga baik dengan penuh *goodwill* dan secara bersahabat, serta akan membatasi diri untuk tidak saling melakukan serangan kata (Usman, 2019:36). Dalam perundingan pertama ini tidak banyak membuahkan hasil, sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan perundingan berikutnya.

### b. Perundingan di Manila Tahun 1963

Diplomasi Manila merupakan upaya untuk merumuskan lebih lanjut perundingan Tokyo, yang sebelumnya belum terselesaikan. Pada pertemuan ini pihak Filipina menyediakan tempat agar pihak Indonesia dan Malaysia kembali bertemu. Perundingan ini akan dilaksanakan di Manila Pertemuan di Manila.

Upaya merumuskan lebih lanjut hasil pertemuan Tokyo, diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina, di Manila pada bulan Juni 1963. Dalam pertemuan Manila, Indonesia dan Filipina menyatakan tidak keberatan dibentuknya federasi Malaysia, asal hal itu dilakukan atas dasar hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat di wilayah-wilayah yang hendak digabungkan, dan ditentukan oleh *otoritas* yang bebas dan tidak berpihak, Sekretaris Jendral PBB (Efantino, 2009:42).

Pertemuan tingkat Menlu diperkuat dengan diadakannya konferensi Tingkat antara Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, Presiden Macapagal, dan Presiden Sukarno yang dilangsungkan di Manila dari 31 Juli sampai 1 Agustus 1963, yang hakikatnya hanya

mengesahkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertemuan tingkat Menlu sebelumnya. Pertemuan ini dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Manila (KTT Manila) (Sarifuddin, 2017:376).

Pada intinya hasil perundingan tersebut untuk memberi kebebasan kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk menentukan nasib sendiri melalui pemungutan suara, dalam hal ini akan diawasi oleh pihak PBB. Akan tetapi dari hasil kesepakatan tersebut, pihak Malaysia menjelang beberapa Minggu dari perundingan Manila telah membentuk federasi Malaysia, itu berarti pihak Malaysia telah melanggar kesepakatan Manila. Hal ini memicu kemarahan pihak Indonesia dan konflik antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas.

#### **c. Perundingan III di Manila Tahun 1964**

Dari konflik yang sedang memanas usaha untuk menyelesaikan konflik pun diluncurkan kembali dengan cara diplomasi. Diplomasi kali ini didatangkan kembali di Manila pada awal tahun 1964. Diplomasi ini diikuti oleh tiga negara yaitu, negara Indonesia, Filipina dan Malaysia. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan pun terjadi, hal ini disebabkan karena dari negara yang ikut dalam konflik ini masih sama-sama mengukuhkan pendapatnya masing-masing, sehingga tidak tercipta jalan keluar.

Diplomasi untuk menyelesaikan konflik kedua negara kembali dilakukan di Manila. Presiden Macapagal yang setuju dengan gagasan Thanat kemudian juga menyampaikan hal itu kepada pihak Indonesia saat ia mengadakan

pertemuan dengan Soekarno, yang berkunjung ke Manila pada tanggal 7 Januari 1964 (Sunarti, 2014:158).

Mengingat forum musyawarah Maphilindo dibentuk sebagai wadah di mana ketiga negara anggotanya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, pemerintah RI berusaha memanfaatkan forum itu untuk menyelesaikan masalah Malaysia (Poesponegoro, 2010:464).

#### **d. Perundingan IV di Bangkok Tahun 1964**

Perundingan dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan, hal ini disebabkan dari kedua negara tidak ada yang mau mengalah, sehingga perundingan yang dilaksanakan oleh pimpinan ketiga negara sebelumnya mengalami kegagalan.

PBB yang melihat konflik antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan, pihak PBB melibatkan diri untuk membantu menyelesaikan konflik kedua negara dengan cara menunjuk Thailand menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan perundingan.

Persidangan tiga penjuror peringkat menteri bermula, seperti yang dijadwalkan di Bangkok. Dalam persidangan ini rombongan Indonesia diketuai oleh Dr. Subandrio, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak dan Filipina diwakili oleh SaWador P. Lopez. Pertemuan ini ketuai oleh Menteri Luar Thailand, Thanat Koman (ott dalam Maksum, 2017:208).

Perundingan dalam upaya memecahkan masalah sengketa Malaysia dilakukan dalam pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina dan Malaysia di Bangkok dari tanggal 5 sampai 10

Februari 1964. Pertemuan itu tidak mencapai hasil karena perbedaan penafsiran tentang genjatan senjata (Poesponegoro, 2010:464).

Malaysia dalam membahas mengenai genjatan senjata, berpendapat bahwa genjatan senjata yang dilakukan Indonesia segera diberhentikan serta dilanjutkan penarikan tentara Indonesia dari wilayah Malaysia. Sedangkan pendapat dari Indonesia, genjatan senjata bisa dihentikan, akan tetapi untuk penarikan tentara Indonesia yang berada di Malaysia ditolak mentah-mentah, bagi Indonesia penarikan tentara akan dilakukan jika diplomasi berhasil.

#### **e. Perundingan V di Bangkok Tahun 1964**

Pada 2 Maret 1964, sedang tuduh-menuduh dan pertempuran senjata antara Malaysia dengan Indonesia berterusan, persidangan tiga penjuror peringkat kedua bermula di Bangkok. Rundingan tahap kedua ini adalah ringkas dan isu pengunduran tentera masih merupakan isu penting yang dibincangkan (Maksum, 2017:209). Perundingan kedua di Bangkok dengan pembahasan yang sama dan masalah pun kembali tidak terpecahan.

Dilakukan dua kali perundingan di Bangkok dengan tema pembahasan sama yaitu mengenai genjatan senjata dan penarikan tentara yang sama-sama tidak menghasilkan jalan keluar untuk memecahkan masalah. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat dan tidak saling percaya dari kedua negara.

#### **f. Perundingan VI di Tokyo Tahun 1964**

Pertemuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Malaysia masih tetap berlanjut dan terjadi beberapa kali pertemuan hingga bulan Juni tahun 1964, dengan harapan bisa menempuh jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada antara Indonesia dan Malaysia.

Perundingan di Tokyo Soekarno dan Tunku Abdul Rahaman hadir. Kemudian Tunku Abdul Rahaman menentukan syarat bahwa gilyawan Indonesia harus ditarik dari Malaysia untuk dapat memulai perundingan lanjutan. Namun syarat yang diajukan Tunku Abdul Rahaman tidak bisa dipenuhi oleh Indonesia dan perundingan gagal. Perundingan terakhir yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara Soekarno, Tunku Abdul Rahman, dan Diosdado Macapagal di Tokyo bulan Juni 1964 juga mengalami kegagalan (Kusmayadi, 2017:25). Sehingga kegagalan diplomasi ini menyebabkan konfrontasi berlangsung terus dan diplomasi ini menjadi kegagalan yang terakhir.

#### **g. Perundingan VII di Bangkok Tahun 1966**

Dilaksanakannya perundingan damai di Bangkok yang berlangsung tanggal 29 Mei- 1 Juni 1966 oleh pemerintah RI dan Malaysia, serta ditandatanganinya hasil perundingan tersebut maka berakhirilah segala bentuk konfrontasi yang pernah terjadi antara kedua negara serumpun.

Tun Abdul Razak yang mengetuai perwakilan langsung dengan Adam Malik yang mengetuai rombongan Indonesia di Bangkok. Selepas berunding selama tiga hari, pada 1 Juni 1966, kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan terhadap

tiga prinsip yang membolehkan masalah antara kedua negara diselesaikan. 1) mereka bersetuju untuk menamatkan permusuhan antara Malaysia dengan Indonesia. 2) mereka bersetuju untuk memulihkan semula hubungan diplomatik selepas sahaja menandatangani perjanjian, dan, 3) menyediakan peluang secepat mungkin untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak sama ada mereka ingin terus bersatu dalam Malaysia (Muniandy, 1996:232).

Perundingan di Bangkok ini menghasilkan Perjanjian Bangkok, yang berisi: Pertama, Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam federasi Malaysia. Kedua, Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Ketiga, Tindakan perumusan antara kedua negara akan dihentikan (Efantino, 2009:85-86). Penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia pada perundingan Bangkok ini ditandai dengan penandatanganan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

### Simpulan

Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia dalam konflik wilayah Sabah dan Sarawak. Pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara keduanya, sehingga Presiden Soekarno mengecam Malaysia dengan kalimat "ganyang Malaysia", dari pemaparan di atas yang bertema studi historis politik luar negeri Indonesia- Malaysia than 1963-1966 dapat ditarik kesimpulan:

1. Konflik antar kedua negara serumpun ini disebabkan adanya upaya kolonial Inggris membuat wilayah koloninya menjadi

sebuah negara. Dengan membentuk federasi melayu. Yang juga mengikutkan Sabah dan Serawak yang mana wilayah tersebut di Pulau Kalimantan menjadi wilayah Indonesia. Intrik ini dilakukan ketika Indonesia sedang memperjuangkan kebebasan Irian Barat (Papua).

2. Konflik antara Indonesia-Malaysia terus memanas, sehingga Indonesia melakukan politik luar negerinya dengan mengambil langkah perundingan dengan Malaysia. Langkah politik luar negeri yang dilakukan Indonesia-Malaysia terjadi 7 perundingan yang cukup panjang.
3. Perundingan yang di mulai tahun 1963-1966. Tahun 1963-1964 terjadi 6 kali perundingan yang menghasilkan kebuntuan diantara kedua belah pihak. Sikap konfrontasi diambil demi menegakkan kedaulatan Indonesia. Baru tahun 1966 di Bangkok perundingan tersebut selesai yang mana wilayah Sabah dan Serawak masuk ke dalam wilayah Malaysia.

### Daftar Pustaka

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Darmawan. (2005). *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*. Bandung: CV Hikayat Dunia.
- Darmawan. (2008). *Sukarno Memilih Tenggelam Agar Sukarno Muncul*. Jakarta: PT Hikayat Dunia.

- Efantino F, Arifin Sn. (2009). *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusmayadi, Yadi. (2017). *Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. *Jurnal Artefak: History and Education*. 4(1).
- Maksum, Ali. (2017). *Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia-Malaysia: Menguak Fakta Dibalik Berbagai Sengketa Dua Negara*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ravico. (2015). *Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821* dalam *Jurnal Tamaddun* Vol. XIV No. 2/ Juli-Desember 2015 alamat web <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/450/400>
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Rochmat, S. (2009). *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanjaya, Adi, Syaiful M, Yustina Sri Ekwandari. (2017). *Usaha Jepang Dalam Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung.
- Sunarti, Linda. (2014). *Persaudaraan Sepanjang Hayat*. Tangerang: Serat Alam Media
- Sunarti, Linda. (2014). *Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama*. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Syarifuddin, (2017). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Usman, Syafaruddin, Isnawati, Din. (2009). *Ancaman Negeri Jiran*. Yogyakarta: MedPress.